

ARKEOLOGI UNTUK SEMUA: BENTUK DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA DI PAPUA

M. Irfan Mahmud

Abstrak. Tulisan dalam *setting* Papua ini ingin memperlihatkan bahwa arkeologi dapat diharapkan ikut berperan menjembatani kebutuhan informasi masyarakat secara luas. Arkeologi memiliki dimensi luas: ideologis, akademis, dan praktis. Secara ideologis, arkeologi terkait dengan aspek kebutuhan dasar masyarakat, yakni identitas dan karakter. Dalam konteks Papua, ditemui banyak isu yang berkaitan dimensi arkeologi, seperti problem identitas budaya, hubungan historis kebangsaan, multikulturalisme, lemahnya muatan pendidikan karakter, rendahnya apresiasi *stakeholder*, komodifikasi, serta persoalan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi. Keterpaduan kegiatan penelitian dengan kepentingan masyarakat dalam konteks wilayah Papua dianggap merupakan salah satu koridor dalam membuka wawasan mengelola isu-isu tersebut. Dalam konteks isu-isu tersebut akan digambarkan bentuk dan prospek program arkeologi terhadap enam kelompok kepentingan di Papua, yaitu: (1) masyarakat umum; (2) pelajar dan guru; (3) anggota legislatif dan para eksekutif (termasuk birokrat); (4) penegak hukum; (5) manajer dan arkeolog; (6) masyarakat lokal. Pada intinya tulisan ini akan menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran implementasi arkeologi dari akademis ke publik. Karena itu, sumberdaya arkeologi merupakan komponen penting pembangunan masa kini dari sumber-sumber masa lalu yang dapat diorientasikan melayani kebutuhan masa kini untuk semua *stakeholder*.

Kata Kunci: Papua, identitas budaya, multikulturalisme kelompok kepentingan

Abstract. *This article in Papua setting is aimed to show that archaeology can fulfill its role as provider of information to society at large. Archaeology has broad dimensions, which are ideological, academic, and practical. Ideologically, archaeology is related to the basic needs of society, which are identity and character. In the context of Papua, there are plenty of issues regarding the dimensions of archaeology, such as the problem of cultural identity, historic relation of nationalism, multiculturalism, the weakness of character education, poor appreciation among stakeholders, commodification, as well as the problem of policies regarding the development and utilization of archaeological sources. The integration between research activities and public needs in the context of Papua is believed to be one of the corridors to open the insights in the management of those issues. In the context of those issues, this article will describe the forms and prospects of archaeological program on six interest groups in Papua: (1) the general public; (2) students and teachers; (3) members of legislative and executive boards (including bureaucrats); (4) law enforcement community; (5) managers and archaeologists; and (6) local communities. In essence, this article will illustrate that there has been a shift of archaeological implementation from academic to public. Therefore archaeological sources are among the important elements in present development based on resources of the past that can be oriented to serve the present needs for all stakeholders.*

Keywords: Papua, cultural identity, multiculturalism, stakeholder

1. Pendahuluan

Dua puluh tahun yang lalu, ketika baru saja menjadi mahasiswa arkeologi semester I, seorang dosen muda eksentrik memulai kuliah

perdana kami dengan mengajukan pertanyaan dasar dengan mengacu penalaran James Deetz (1972): “apa itu arkeologi?”¹. “Untuk apa itu

¹ Pertanyaan Deetz sesungguhnya ingin menyatakan bahwa

arkeologi?”. Mulanya, saya tidak bersemangat ketika mendengar jawaban seorang kawan bahwa arkeologi itu ilmu yang mencari sisa tulang-belulang dan sampah-sampah kehidupan manusia dari masa lalu. Beberapa saat kembali antusias setelah sang dosen muda menjelaskan bahwa jawaban seperti itu berasal dari pemikiran kanak-kanak. Obyek arkeologi lanjutnya, cukup kompleks. Arkeologi tidak hanya menemukan sisa-sisa artefak, melainkan juga mengkaji tradisi berlanjut beserta proses perubahannya, lingkungan hunian, dan sisa jasad dari manusia secara sistematis. Arkeologi akan menghasilkan pengetahuan tentang masa lalu dan hubungan antara artefak dan perilaku manusia. Meskipun demikian, penjelasan mengenai arkeologi saat itu masih diarahkan pada aspek akademis semata, untuk ilmu pengetahuan.

“Arkeologi untuk semua” yang menjadi inti tulisan ini akan memperlihatkan terjadinya pergeseran orientasi sasaran program dari akademis ke masyarakat. Berdasarkan penelitian peninggalan manusia masa lampau dalam konteks yang luas dan implementasi yang beragam kajian arkeologi tidak sedikit telah memberi andil dalam menghasilkan pengetahuan dan cara-cara untuk penguatan jati-diri khususnya, dan pembangunan kebudayaan pada umumnya. Dengan setting program di Papua, tulisan “arkeologi untuk semua” akan menggambarkan implementasi paradigma yang sudah semakin memiliki pemahaman dewasa dan diharapkan semakin

sesuatu yang sederhana seharusnya dipahami untuk menyatakan isu-isu besar. Pertanyaan Deetz sesungguhnya sangat dalam dan setiap saat harus dipahami arkeolog ketika memulai pekerjaan, untuk mendorong arkeologi ke kedudukan studi yang lebih kontekstual (Mahmud 2003: vi). Menurut Foucault istilah arkeologi dimaksudkan mencari (*arche*), asal-usul tertentu. Ada banyak definisi arkeologi dari sudut pandang masing-masing ahli, diantaranya berasal dari Piggot dalam *Approach to Archaeology* berpendapat bahwa arkeologi menyangkut penyelidikan sejarah; Glyn Daniel dalam *A Short History of Archaeology* mendefinisikan bahwa arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang berhubungan dengan peninggalan material manusia dari masa lampau serta seluruh sumber dan gambaran sebenarnya manusia masa lalu. Selain pakar yang menempatkan arkeologi sebagai cabang dari ilmu sejarah, sebagian juga memandang arkeologi sebagai bagian dari antropologi, diantaranya Haviland (1988) dan Soejono (1976). Menurut Haviland, arkeologi adalah cabang dari ilmu antropologi yang lebih banyak berkecimpung dalam studi tentang masa lampau; sementara Soejono menyatakan, arkeologi adalah suatu ilmu yang memusatkan perhatiannya pada hal ihwal perilaku manusia masa lampau.

tampak manfaatnya sebagai sumberdaya baru (informasi) yang berdayaguna untuk semua kelompok kepentingan.

Sejak memasuki abad XXI, masyarakat telah menjadikan informasi sebagai kebutuhan---termasuk hasil penelitian---dan dengan demikian dapat dijadikan komoditi² dan penentu kehidupan (Magetsari 2001: 1-3). Banyak industri baru yang lahir akibat kebutuhan informasi, dalam bentuk penciptaan, penyimpanan, publikasi, dan interpretasi terhadap komoditi informasi tersebut. Kita dapat menyaksikan keberhasilan media televisi swasta melakukan reproduksi dan deseminasi informasi arkeologi dalam banyak ragam program serta menjadi pengisi rubrik koran/majalah lokal dan nasional.

Semakin diyakini bahwa hasil penelitian arkeologi dapat menjadi komoditi informasi bernilai ekonomis untuk semua kalangan jika kita dapat terus meningkatkan kreatifitas. Arkeologi diketahui memiliki dimensi luas: ideologis³, akademis⁴, dan praktis⁵ (ekonomis), serta terkait dengan masyarakat. Lalu,

2 Dalam ilmu linguistik, kata “komoditi” ini mulai dikenal dan dipergunakan di Inggris pada abad ke 15 yang berasal dari bahasa Perancis yaitu “*commodité*” yang berarti “sesuatu yang menyenangkan” dalam kualitas dan layanan. Kata komoditi berakar dari bahasa Latin disebut *commoditas* yang merujuk pada berbagai cara untuk pengukuran yang tepat dari sesuatu; keadaan waktu ataupun kondisi yang pas, kualitas yang baik; kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau properti; dan nilai tambah atau keuntungan. Secara lebih umum, komoditi berarti suatu produk yang diperdagangkan, termasuk informasi, valuta asing, instrumen keuangan dan indeks. Karakteristik dari komoditi, yaitu harga sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual dan harga berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku. Menurut Marx, setiap komoditi mempunyai aspek ganda: disatu pihak ‘nilai pakai’ (*use-value*) dan dilain pihak ‘nilai tukar’ (*exchange value*), Lihat Giddens 1986: 57-60).

3 Dimensi ideologis berkenaan dengan aspek alam-cita guna memantapkan identitas budaya, yang berkenaan dengan fungsi-fungsi pendidikan. Dalam kerangka fungsi pendidikan, sumberdaya arkeologi merupakan media sangat efektif dalam memberi contoh kongkrit, terutama bagi siswa yang masih muda, serta juga menarik bagi siswa yang lebih dewasa (Rahardjo dan Hamdi Muluk 2011: 3). Dimensi ideologis ini tidak dapat dipisahkan dengan dimensi akademis.

4 Dimensi akademis sumberdaya arkeologi berkaitan dengan penyelamatan sumber-sumber data, terutama lewat penelitian. Dimensi akademis ini berkaitan erat dengan fungsi-fungsi pendidikan, sehingga tetap juga mengandung dimensi ideologis (lihat McGimsey III 1972: 2).

5 Dimensi Praktis (ekonomis) sumberdaya arkeologi berkenaan dengan pariwisata. Pemanfaatan sumberdaya arkeologi untuk kepentingan pariwisata diakui telah memberikan keuntungan bagi banyak pihak, termasuk masyarakat

untuk apa arkeologi terlibat dalam upaya pembangunan karakter⁶/ideologi bangsa? Kata Yudi Latif (2009: 95-96), kejatuhan politik cuma kehilangan penguasa; kejatuhan ekonomi, cuma kehilangan sesuatu; tetapi kalau kejatuhan karakter, suatu bangsa akan kehilangan segalanya. Dengan demikian, keterlibatan arkeolog mengemas hasil penelitian yang mampu dibaca dan dicerna oleh masyarakat akan menegaskan perannya dalam pembangunan bangsa untuk semua.

Secara akademis, kebutuhan berbagai pihak akan hasil penelitian arkeologi untuk menemukan, merekonstruksi dan mendeskripsikan asal-usul bersama ratusan suku yang mendiami wilayah Indonesia. Hasil gambaran genealogi suku kemudian diharapkan menjadi perekat rasa kebangsaan. Ragam hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber data/informasi tiga pilar pokok arkeologi, yaitu rekonstruksi sejarah-kebudayaan, cara-cara hidup, dan transformasi budaya (Binford 1972; Sharer & Ashmore 1979). Dalam ketiga pilar itu, hasil penelitian arkeologi dapat memberi banyak pengetahuan, pengalaman dan pengajaran berkenaan dengan banyak tema-tema kebudayaan masa lalu. Karena itu, arkeologi dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat masa kini dan mampu membawa perubahan kualitas manusia di masa depan.

Secara praktis, penelitian dihadapkan tantangan bagaimana menemukan rancangan kreatif yang dapat berdampak pada dimensi ekonomis sumberdaya arkeologi⁷, khususnya pariwisata. Kenyataan menunjukkan bahwa

sektor pariwisata telah menjadi salah satu bagian yang tak terelakkan dalam mengelola sumberdaya arkeologi ke masa depan. Untuk itu, perhatian pada penelitian terapan⁸ juga diperlukan dalam rangka memberi dampak lebih luas hasil kerja arkeologi kepada semua kelompok masyarakat. Penelitian terapan dimaksudkan sebagai studi yang berwawasan dan berorientasi pada manfaat sumberdaya arkeologi beserta lingkungannya yang bisa menjadi “katalisator”⁹ tumbuhnya ekonomi rakyat. Bertolak dari peran arkeologi untuk semua, tulisan ini akan membahas keterpaduan kegiatan penelitian dengan kepentingan masyarakat luas terhadap hasil penelitian arkeologi dalam konteks wilayah Papua.

2. Isu Aktual

Di wilayah Papua, isu-isu aktual yang terkait dengan dimensi ideologis, akademis, dan praktis dapat dijumpai dalam beragam latar dan aras (tingkatan). Pada aras atas isu-isu ideologis mewarnai wacana politisi, LSM, birokrat, dan akademisi. Pada aras menengah isu akademis menjadi perbincangan menarik di kalangan ilmuan dan peneliti. Sementara pada aras bawah dapat ditemukan banyak kenyataan antagonis di kalangan mahasiswa, pelajar, guru, yang juga terkait langsung atau tidak langsung dengan isu ideologis dan akademis. Secara praktis, banyak kenyataan dalam upaya pengembangan sumberdaya arkeologi dan pendayagunaan hasil-hasil penelitian terhadap para wisatawan yang dihadapi pula para birokrat dan peneliti. Isu-isu praktis sering juga merupakan dampak dari isu ideologis atau akademis.

6 Pembangunan karakter diorientasikan pada dimensi pendidikan, yakni berkaitan dengan segi kepribadian yang terkait dengan kualitas moral. Dalam pembangunan karakter penting pula diperhatikan pengembangan kesadaran akan potensi dan kapasitas yang khas yang membedakan seseorang dari suatu lingkungan budaya dengan orang lain (lihat Latif 2009: 89-93).

7 Sumber daya arkeologi dapat dimengerti dari asal-usul katanya. “Sumberdaya” merupakan padanan kata “*resource*” dalam Bahasa Inggris yang dibedakan dari kata “*source*” yang berarti “sumber”. Sumberdaya dalam konteks ini berarti “sesuatu yang tersedia, yang apabila diperlukan dapat digunakan sebagai sumber untuk mengambil sesuatu, atau, sebagai modal untuk membuat sesuatu. Kata “*resource*” juga berarti “kemampuan untuk menghadapi situasi dengan efektif” (Sedyawati 2002: 9). Jadi, sumberdaya arkeologi merupakan obyek-obyek arkeologis yang merupakan salah satu sumberdaya dasar dalam pembangunan, berupa situs, artefak dan aspek-aspek arkeologis lainnya.

8 Penelitian terapan pada dasarnya bertujuan mempertemukan kepentingan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian terapan proses kegiatan penelitian juga berlandaskan teori atau eksperimen yang orisinal yang diarahkan pula untuk memperoleh pengetahuan baru dengan sasaran manfaat yang langsung dapat menghasilkan, mengembangkan, dan meningkatkan produk atau proses yang sudah ada sebelumnya.

9 Katalisator berarti sesuatu benda atau bahan yang dapat mempercepat reaksi perubahan tanpa merubah substansi asalnya (sumber bahan katalisator). Karakter katalisator akan selalu menciptakan keseimbangan. Jadi, dalam peran sebagai katalisator, data dan artefak beserta para arkeolog akan tetap sebagaimana adanya, meskipun digunakan dan berperan untuk kebutuhan mempercepat perubahan dalam pengembangan dan penguatan ideologi bangsa, pendidikan, dan ekonomi (pariwisata).

Tuntutan pengakuan atas identitas dan diterimanya perbedaan budaya Papua sering muncul sebagai isu ideologis. Tuntutan pengakuan identitas Papua yang akhir-akhir ini memanas, tampaknya sangat membutuhkan sharing pengalaman akan multikulturalisme¹⁰ Bangsa Indonesia. Tuntutan pengakuan identitas sering berupa demonstrasi dan juga Kongres Rakyat Papua yang sudah tiga kali dihelat (lihat Harian *Cendrawasih Pos*, 7/10/2011: 1), terakhir pada tanggal 16-20 Oktober 2011 (*Cendrawasih Pos*, 18 Oktober 2011: 1). Tuntutan itu tampak berkaitan dengan pandangan kebanyakan Orang Papua bahwa belum ada bukti-bukti arkeologis dan historis (catatan tertulis) yang pernah ditinggalkan periode kejayaan kerajaan-kerajaan kuno¹¹ klaim Indonesia atas Papua Barat¹² (Peyon 2010: 13).

Fenomena timbulnya politik identitas¹³ mulai merebak di akhir abad XX sebagaimana

10 Multikulturalisme dapat diartikan sebagai keragaman budaya yang bergabung dalam suatu komunitas bangsa yang lebih luas. Ada dua pola besar keragaman budaya: (1) keragaman budaya timbul dari masuknya ke dalam nagara yang lebih besar, budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya, terkonsentrasi secara teritorial; (2) keragaman budaya timbul dari imigrasi perorangan atau keluarga. Lebih lanjut dapat ditelusuri dalam buku Kymlicka, *Kewargaan Multikultural* (2002) dan Melzer *et al.* (ed), *Multiculturalism and American Democracy* (1998)

11 Kerajaan-kerajaan kuno yang sering dirujuk dalam kaitan dengan nasionalisme bangsa Indonesia senantiasa dikaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan besar ini diakui memiliki pengaruh yang sangat luas, bukan saja di Nusantara melainkan juga hingga sebagian besar Asia Tenggara. Gambaran kejayaan Sriwijaya selanjutnya dapat dilihat pada karya O.W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III—Abad VII* (2011); sedangkan Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari karya H. Kern, "De Nagarakrtagama, Oudjavaansche Lofdicht op Koning Hayam Wuruk van Majapahit" (VG VII, 1917: 249-320; VG VIII: 1-132); N. J. Krom, *Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakrtagama van Prapañca -1365 AD* (1919); Sartono Kartodirdjo dkk., *700 tahun Majapahit (1293-1993), suatu Bunga Rampai* (1995); Irawan Djoko Nugroho, *Majapahit Kerajaan Maritim*, (2010)

12 Papua Barat merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang berada di Pulau New Guinea sejak tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian Den Haag tanggal 16 Mei 1895 Pulau New Guinea dengan luas 892.000 km² terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian Barat dan Timur dengan garis batas di tengahnya. Pada bagian Timur Pulau New Guinea sebelah Utara menjadi koloni Jerman yang disebut Wilhelmstad; sementara bagian selatan dikuasai Inggris. Bagian Barat pulau New Guinea dikuasai Belanda dengan luas 416.000 km². Secara geografis Papua Barat berada di bagian tengah hingga barat (Kepala Burung) yang sekarang terintegrasi dengan Negara Republik Indonesia (Lihat Peyon 2010: 1).

13 Politik identitas yang dimaksudkan disini ialah cara-cara memperjuangkan kepentingan tertentu yang didasarkan pada akar budaya, sejarah, wilayah ataupun golongan.



Peta 1. Peta luas wilayah kerja Balar Jayapura di Papua

diamati Clifford Geertz (1996). Fenomena politik identitas merupakan problem ideologis (jati-diri) yang sampai sekarang juga terus dipertanyakan Orang Papua. Justru itu, proses kebudayaan Papua penting dinarasikan secara faktual aspek data historis, arkeologis, etnoarkeologis¹⁴, religius atau semacam itu yang sambung-menyambung menjadikan mozaik struktur kebudayaan mereka sekarang. Sebagaimana Bangsa Indonesia pada umumnya yang diamati Geertz (Geertz: 1996: 81), sejarah-kebudayaan Papua sangatlah kompleks; tidak hanya multi-etnis, melainkan juga arena pengaruh multi-mental Melanesia¹⁵, Austronesia¹⁶, Kristen, Islam, Eropa,

14 Aspek etnoarkeologis, suatu metode yang dicetuskan pada tahun 1960 oleh Carol Kramer (Watson & Kramer 1979) yang ditujukan untuk menjembatani ketidaktahuan kita sekarang tentang penjelasan peninggalan budaya masa lalu (artefak), baik makna maupun perilaku manusia pendukungnya. etnoarkeologi; suatu "cara" yang digunakan arkeolog untuk memperoleh bahan analogi etnografis. Tujuannya, untuk membantu mengatasi sejumlah persoalan dalam interpretasi arkeologi sebagai analogi obyek atau aspek budaya sejenis yang masih hidup sampai sekarang.

15 Melanesia merupakan istilah yang diperkenalkan Jules Dumont d'Urville pada 1832 dari Bahasa Yunani yang berarti "pulau hitam". Melanesia adalah sebuah wilayah yang memanjang dari Pasifik barat sampai ke Laut Arafura, utara dan timur laut Australia. Istilah Melanesia digunakan pertama kali untuk menunjuk ke sebuah etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Sekarang ini, klasifikasi rasial d'Urville dianggap tidak tepat sebab mengaburkan makna keragaman budaya, linguistik, dan genetik Melanesia dan sekarang ini hanya digunakan untuk penamaan geografis saja.

16 Austronesia (australis = south; nesos = island) merupakan terminologi yang pertama kali diperkenalkan oleh W. Schmidt (1899) untuk menyebut rumpun bahasa yang dituturkan oleh penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara dan Pasifik. Pada hakekatnya, istilah Austronesia sekarang dalam konteks yang luas mengacu pada penutur dan budayanya secara keseluruhan. Dimensi pendukung bahasa dan budayanya membentang 15.000 kilometer dari kepulauan yang terbentang di antara Madagaskar di ujung barat dan kepulauan Paskah di ujung timur Pasifik, serta

kapitalisme¹⁷, dan seterusnya. Secara historis ada yang belum dipahami oleh hampir semua kelompok kepentingan bahwa “kebanyakan komunitas politik terorganisasi yang terekam di sepanjang sejarah merupakan masyarakat multi-etnis, suatu testamen terhadap penaklukan dan perdagangan jarak jauh yang terdapat di mana-mana dalam urusan manusia” (Kymlicka 2002: 2).

Rekam jejak pembetulan mozaik multikulturalisme dapat ditemukan para arkeolog buktinya pada sejumlah situs¹⁸, sebagai bentuk akulturasi¹⁹ asimilasi²⁰, atau kantong-kantong etnis baru yang terpisah dengan budaya etnis lokal meski tetap berdampingan dan berinteraksi secara baik sampai terbentuknya entitas negara Indonesia yang mempersatukan kita. Sayang sekali narasi yang memberi pemahaman ideologis dan akademis keberagaman itu masih sangat sedikit dapat diungkap dan efektif digunakan dalam penguatan jati-diri bangsa sekarang ini.

Taiwan-Mikronesia di bagian utara dan Selandia Baru di selatan (Simanjuntak 2008: 33).

17 Kapitalisme berasal dari kata capital, yaitu suatu sistem produksi komoditi. Di dalam sistem kapitalis para pemproduksi tidak sekedar menghasilkan bagi keperluannya sendiri, atau untuk kebutuhan individu yang mempunyai kontak pribadi dengan mereka; lebih dari itu kapitalisme melibatkan pasar pertukaran yang mencakup nasional sampai global (Giddens 1986: 57-177).

18 Rekam jejak mozaik multikulturalisme masih tampak dari 300-an suku yang hidup di Papua. Penelitian etno-arkeologi juga menemukan fenomena multi-etnis pada wilayah Papua, diantaranya situs di Jayawijaya, Asmat, Tolikara, Paniai, dan Jayapura. Para arkeolog juga menemukan bukti percampuran budaya di situs-situs Kabupaten Biak, Waropen, Nabire, Raja Ampat, Sorong, Jayapura, Fak-Fak, dan Kaimana.

19 Akulturasi adalah proses saling pengaruh antar-budaya pada suatu masyarakat dimana unsur-unsur dari kebudayaan asing yang berbeda sifatnya lambat-laun diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaan yang bersangkutan (Lihat Koentjaraningrat 1990: 91). Fenomena akulturasi mula-mula dicetuskan dari penelitian yang dipelopori oleh J. Powell tahun 1880 dengan istilah “*culture borrowing*”, lalu panitia dari *Social Science Research Council* tahun 1935 yang terdiri dari R. Redfield, R. Linton, dan M. Herskovits merumuskan: “*acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups*”. Intinya, dua kebudayaan bertemu (interaksi), lalu menyebabkan penerimaan dari nilai-nilai kebudayaan lain, dimana nilai baru diinkorporasi dalam kebudayaan lama (lihat Bakker SJ 1990:113-133).

20 Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok.

Isu akademis berkenaan dengan belum terpolanya pendidikan karakter bangsa di wilayah Papua, terutama di sekolah dasar sampai menengah. Padahal menurut Kidder, jika kita ingin maju secara budaya, perlu adanya pendidikan karakter sejak dini. Begitu pentingnya pendidikan karakter sehingga dicanangkan oleh presiden SBY pada tanggal 25 Mei 2011. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Beberapa area di bawah payung ini meliputi: (i) penalaran moral/pengembangan kognitif”, (ii) pembelajaran sosial dan emosional”, (iii) pendidikan kebajikan moral”, (iv) pendidikan keterampilan hidup”, (v) pendidikan kesehatan”, (vi) “pencegahan kekerasan”, (vii) resolusi konflik” dan (viii) filsafat etik/moral” (Latif 2009: 82). Lantaran pendidikan karakter memiliki horizon yang luas dan pendekatan holistik, maka pintu “arkeologi untuk semua” juga sangat terbuka lebar pada area isu ini.

Sejauh ini, masih sangat sedikit data arkeologi yang dapat digunakan masyarakat Papua memahami akar kebudayaan. Padahal data arkeologi akan menunjukkan esensi budaya, fenomena silang budaya dan mobilitas migrasi yang memungkinkan percampuran ras (bahasa, darah, sejarah) pada tanah/daratan yang sama. Di Papua, studi etnoarkeologi menemukan bahwa secara esensial budaya purba masih hidup, seperti: mitos²¹, visi ekstatik²², simbol²³ keagamaan, keyakinan

21 Mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang empunya cerita. Cerita mitos ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya maut, bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam, dan sebagainya. Cerita mitos di Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta (*cosmogony*), terjadinya susunan para dewa, dunia dewata (*pantheon*), terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa kebudayaan (*culture hero*); terjadinya makanan pokok, seperti beras dan sebagainya. (Danandjaya 2002: 50-57).

22 Visi ekstatik merupakan fenomena perwujudan jiwa ketaksadaran (*unconscious psyche*) yang terekspresikan dalam pola-pola archetypes (pemikiran universal) yang memberi kekayaan pada spritualitas manusia. Banyak visi ekstatik manusia pra-aksara diekspresikan dalam bentuk lukisan-lukisan.

23 Simbol merupakan sebuah obyek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak, misalnya burung merpati sebagai simbol kedamaian. Menurut Charles Sanders Peirce (Teori Trikonomi Semiotika

budaya, dan ritus orang-orang pra-aksara (*preliterate*). Namun di sekolah-sekolah formal sudah makin sangat jarang kita mendengar penggambaran warisan spiritual dari evolusi manusia. Di Papua, sangat kaya sumberdaya arkeologi yang merupakan ekspresi mitos-mitos untuk menunjukkan adanya realitas yang lebih tinggi dari manusia. Namun dewasa ini generasi muda Papua sendiri sudah sangat kurang mengetahui banyak potensi sumberdaya arkeologi, khususnya situs dan nilai-nilainya yang seharusnya dihayati dengan baik. Pada sejumlah situs di Papua juga ditemukan bukti-bukti silang budaya dan migrasi manusia. Namun, bahan-bahan pendidikan di sekolah berkenaan dengan silang-budaya dan migrasi masih belum mendapat perhatian serius.

Tidaklah heran jika Indonesia yang dulu dikenal sebagai “*exotic garden of the east*” kian melorot dibandingkan Malaysia (Latif 2009: 138). Pada tahun 2007, dari 124 negara yang dicatat dalam *World Economic Report Tourism Competitiveness Ranking*, Indonesia hanya menempati urutan ke-60, sedangkan negeri Jiran Malaysia berada pada urutan ke-31 (Latif 2009: 138). Hal ini merupakan antagonis dari keadaan yang sebenarnya, karena semestinya dengan semakin banyaknya sumberdaya arkeologi yang ditemukan dan dilaporkan, seharusnya Indonesia lebih unggul dari Malaysia. Mungkin kita berbeda karena Malaysia dalam pengelolaannya sudah mampu melakukan komodifikasi²⁴ secara matang dengan fokus pada pengembangan kualitas



Foto 1. Mitos, simbol keagamaan, dan keyakinan budaya yang masih hidup dalam alam pikiran suku-suku di Papua. Dari kiri ke kanan tampak gambar pahat patung arwah atau *amfianir korwar* (Biak), lukisan kura-kura di situs megalitik Tutari (Jayapura); lukisan cadas mitos *namatuto* (Kaimana), lukisan simbol (Kaimana), patung *mbis* besar (Asmat)

Secara praktis, isu yang menarik berkaitan dengan kurang maksimalnya pemanfaatan sumberdaya arkeologi oleh para stakeholder di Papua. Bahkan pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, menganggap jika sumberdaya arkeologi hanyalah ‘bonus’ dalam program pariwisata mereka yang mengandalkan wisata bahari (Sukandar 2011: 24). Sangat ironis memang, Papua yang kaya sumberdaya arkeologi, tetapi sedikit sekali kontribusinya pada target pariwisata. Dalam tahun 2011, Papua rata-rata hanya dikunjungi 50 orang wisatawan mancanegara, dimana sangat jauh berkurang dibandingkan tahun 2010 dengan rata-rata kunjungan 100 orang wisman per bulan (Okezone.com, 14/10/2011) dan setahun 3200 orang wisatawan, termasuk wisatawan domestik (Antara News, 20/4/2011).

kawasan sumberdaya arkeologi (situs) sebagai destinasi bukan kuantitasnya saja, sedangkan kita masih dalam taraf perdebatan antara akademis dan ideologis versus praktis beserta dampaknya atau antara penelitian murni²⁵ dan penelitian terapan.

Upaya komodifikasi telah banyak dipikirkan pemerintah dan pemerintah daerah. Namun demikian, cara-cara mengubah potensi sumberdaya arkeologis lainnya menjadi sebuah komoditi dan direproduksi oleh pasar guna memenuhi kebutuhan konsumsi para wisatawan belum berkembang baik di Papua.

Arsitektural): Simbol merupakan tanda yang hadir karena mempunyai hubungan yang sudah disepakati bersama atau sudah memiliki perjanjian (*arbitrary relation*) antara penanda dan petanda.

24 Komodifikasi kebudayaan merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan aspek-aspek tradisional dan warisan budaya lainnya untuk kepentingan praktis-ekonomis, khususnya di sektor pariwisata. Contoh-contoh tentang hal ini dapat dilihat pada buku *Identitas Dayak* (Maunati 2004: 247).

25 Penelitian murni sering pula disebut penelitian dasar, yaitu upaya kajian yang berorientasi pada dimensi teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar (*the underlying foundations*) dari fenomena atau fakta yang teramati, tanpa memikirkan penerapannya.

Sumberdaya arkeologi umumnya hanya menjadi perhatian pemerintah, khususnya lembaga yang membidangi arkeologi, baik Balai Arkeologi maupun Balai Pelestarian Purbakala (BP3). Bagi masyarakat lokal, kurang adanya dana dan keuntungan ekonomi yang dianggap belum menjanjikan dalam upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi sering dijadikan alasan.

Bagi pemerintah daerah sendiri, persoalan penelitian dan pengembangan arkeologi memiliki banyak persoalan. Pertama, sulit membuat warga memahami bahwa sumberdaya arkeologi di wilayah mereka dapat laku dijual, dan hal itu akan berdampak ganda (*multi-player effect*) bagi peningkatan kondisi ekonomi mereka. Kedua, daya tarik sumberdaya arkeologi sebagai destinasi wisata juga masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut (jangka panjang) terhadap masyarakat, pendidikan, dan sarana pendukung lainnya di masing-masing wilayah situs yang akan dikelola.

Masalah lain berkaitan dengan masih rendahnya apresiasi stakeholder: pemerintah daerah (Pemda), pelajar dan mahasiswa, swasta, LSM, serta masyarakat umum. Pemerintah daerah sejauh ini belum tampak kebijakan yang mendorong peningkatan apresiasi terhadap sumberdaya arkeologi (situs dan artefak). Salah satu upaya berupa himbauan agar kantor, restoran, hotel dan bangunan lain memanfaatkan gambar-gambar yang bersifat promosi wisata situs arkeologi pada bagian ruangnya. Jadi komodifikasi potensi sumberdaya arkeologi di Papua masih perlu upaya maksimal untuk memberi manfaat untuk semua.

3. Manfaat Hasil Penelitian: Bentuk dan Prospek

Sampai saat ini, secara obyektif ukuran pemanfaatan hasil penelitian arkeologi untuk semua *stakeholder* di wilayah Papua masih belum dapat diketahui secara pasti. Hal inilah yang membuat kita peneliti arkeologi agak kesulitan menjawab pertanyaan kritis berkenaan seberapa besar manfaat hasil penelitian untuk masyarakat; siapa saja yang telah menggunakannya? Data pasar informasi arkeologi sejauh ini belum kita

miliki. Meskipun demikian, bentuk-bentuk pemanfaatannya sudah dapat tampak serta prospek pengembangannya sudah dapat menunjukkan hal-hal positif seiring dengan semakin meningkatnya apresiasi banyak kelompok kepentingan, terutama di lingkungan kerja Balai Arkeologi di luar Papua. Menyadari keterbelakangan tersebut, setidaknya dalam 3 tahun terakhir Balai Arkeologi Jayapura telah mencoba mengupayakan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan semua lapisan masyarakat, yaitu: birokrat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan peneliti, pelajar dan mahasiswa, masyarakat adat, budayawan, wartawan, dan juga pihak swasta serta masyarakat umum. Target kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang menjadi sasaran program/kegiatan Balai Arkeologi Jayapura tersebut, telah menjangkau pihak-pihak sebagaimana rumusan Carman (2001: 108) dalam studi sumber daya kulturalnya, bahwa berdasarkan kedudukan, kebutuhan, dan tugas-tugasnya, kelompok kepentingan (*stakeholder*) dibagi dalam enam kategori, yaitu: (1) masyarakat umum; (2) pelajar dan guru; (3) anggota legislatif dan para eksekutif (termasuk birokrat); (4) penegak hukum; (5) manajer dan arkeolog; (6) masyarakat lokal (Mahmud 2004: 18).

3.1 Arkeologi untuk Masyarakat Umum

Gambaran masyarakat umum di Indonesia, sebagaimana juga di wilayah Papua masih sangat kurang pengetahuan tentang sumberdaya arkeologi, baik yang berada di daerahnya, apalagi di luar wilayahnya. Kondisi itu disebabkan masih kurangnya informasi tentang arkeologi yang mampu mereka akses. Padahal arkeologi dapat mempererat komitmen bersama. Untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat umum terhadap sumberdaya arkeologi, khususnya informasi hasil-hasil penelitian, pameran menjadi pilihan yang tepat. Pameran hasil penelitian dapat menjadi salah satu media yang mendekatkan informasi arkeologi untuk semua lapisan masyarakat, sebagaimana tampak dari antusiasme pengunjung pada beberapa *event* sebelumnya. Barangkali yang

perlu dikembangkan terus-menerus berkaitan dengan format dan materi pameran agar terus kontekstual. Sekarang kita telah mengenal pameran konvensional dengan waktu terbatas pada gedung, lalu Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional telah mengembangkan *Archaeology Goes to Mall* dan *Archaeology on the Street* yang cukup sukses untuk beberapa hari pelaksanaan. Di masa akan datang mungkin kita arkeolog juga perlu memikirkan “galeri mini hasil penelitian” sebagai bentuk pelayanan tetap yang sederhana di kantor masing-masing untuk dapat dinikmati semua masyarakat setiap saat sebagai bentuk pendayagunaan informasi yang sinergis dengan ruang artefak dan perpustakaan.



Foto 2. Pameran arkeologi di Papua Trade Center (PTC), Jayapura

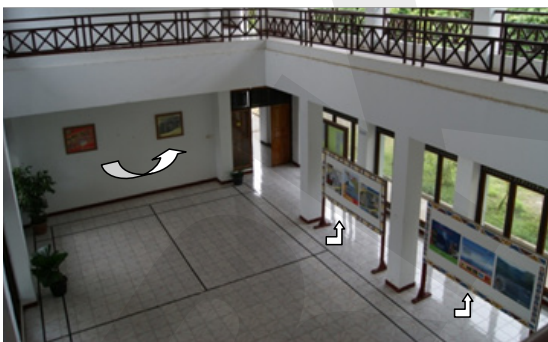


Foto 3. Upaya sederhana menuju persiapan *In-House Gallery* Balai Arkeologi Jayapura



Foto 4. Sosialisasi/penyuluhan arkeologi bagi pelajar SMU di Manokwari, Papua Barat

3.2 Arkeologi untuk Pelajar dan Guru

Pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan ideologis dan akademis bagi para pelajar dan guru, memiliki banyak bentuk, seperti “penyuluhan/sosialisasi arkeologi di sekolah-sekolah” (Tahun 2006-2008), “Tamu Pelajar Arkeologi” (Tahun 2008), “Workshop pemandu pameran arkeologi” (Tahun 2009), “Lomba-lomba berdimensi arkeologi” (Tahun 2009) dan pameran hasil penelitian (Tahun 2009, 2010). Kegiatan semacam itu telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Lewat kegiatan semacam itu para pelajar diajak untuk mencintai dan memahami akar budayanya serta mau memelihara sebagai aset kekayaan bangsa secara bersama-sama dalam masyarakat multikultural. Hasil penelitian arkeologi, bagi pelajar dan guru dapat bermanfaat untuk: Pertama, memperkaya muatan lokal pendidikan dasar berkaitan dengan sumberdaya arkeologi. Kedua, informasi rekreatif yang dapat menambah wawasan lingkungan sejarah-kebudayaan pelajar, tentang asal-usul dan sejarah bangsanya. Ketiga, membantu mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, logika, seni, perhitungan, dan kosmologi.

Bagi para guru, informasi arkeologi memiliki nilai yang cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada semua tingkat pendidikan. Melalui informasi arkeologi, para guru dapat memperoleh bahan pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai adiluhung kebudayaan serta proses perkembangan bangsa dari prasejarah ke masa kini. Selain itu, informasi arkeologi juga dapat mereka gunakan untuk memperkaya bahan pendidikan mental-spiritual bangsa dengan

membangkitkan kesadaran dan kebanggaan akan sejarah peradaban bangsanya, sekaligus memperkokoh kepribadian dan jatidiri serta mempertebal rasa harga diri. Dengan partisipasi aktif arkeologi dalam dunia pendidikan, akan meningkatkan dampak pada upaya pembangunan yang berbudaya sebagai persiapan generasi yang akan mengisi berbagai lembaga kemasyarakatan di masa depan.



Foto 5. Siswa SD Pengunjung Pameran



Foto 6. Siswa SMP mengikuti program "Tamu Pelajar Arkeologi" di kantor Balai Arkeologi Jayapura



Foto 7. Siswa SMU se-kota Jayapura mengikuti "workshop Pemandu Pameran"

3.3 Arkeologi untuk Anggota Legislatif, Eksekutif, dan LSM

Para anggota legislatif, para eksekutif dan aktivis LSM di Papua sering terlibat dalam diskusi politik mengenai hak-hak dasar Orang

Papua, nasionalisme, identitas, dan akar sejarahnya. Tidak sedikit diantara mereka mempertanyakan bukti otentik hubungan Papua dengan konsep wawasan Nusantara. Sebagaimana umumnya para sejarawan, kaum intelektual Papua yang mengacu pada hubungan, --- baik politik maupun dagang,--- pada masa awal keemasan sejarah Nusantara periode Sriwijaya dan Majapahit menganggap belum cukup bukti empiris (artefak) yang menunjukkan Papua merupakan bagian dari Indonesia. Pada tataran debat ini, data dari situs dan artefak yang lebih tua mungkin dapat bermanfaat memecahkan kebuntuan diskusi, karena kata Richard L. Ford (1973) nasionalisme bangsa tumbuh bersamaan dengan studi prasejarah yang dalam konteks Papua materi studi untuk isu ideologis tersebut sangat tersedia. Hasil penelitian Balai Arkeologi Jayapura misalnya, telah menemukan banyak bukti kehadiran pengaruh bangsa ras penutur Bahasa Austronesia di sepanjang pesisir Utara sampai wilayah Kepala Burung beserta pulau-pulauanya. Bukti-bukti pengaruh Austronesia yang paling menonjol ditemukan pada sejumlah situs di Papua, yaitu gerabah slip merah dan seni cadas. Selain itu, Spring (1997) mendaftarkan jenis artefak yang muncul batu setelah adanya interaksi antara Austronesia dan Melanesia, diantaranya beliung persegi, penumbuk biji, artefak kerang conus, kail kerang, pahat batu poles, bentuk rumah persegi empat, dan perkampungan terbuka (Tanudirdjo 2011: 25). Selain itu, penutur Bahasa Austronesia juga memperkenalkan ke masyarakat Melanesia tradisi kunyah pinang, domestikasi hewan, dan pola penguburan dengan wadah. Hubungan Papua dengan kawasan Barat Nusantara hingga Asia Tenggara semakin diperkuat oleh terbentuknya koneksi budaya Dongson (kapak perunggu, moko, dan lain-lain).

Dalam kepentingan ideologis dan akademis, pemahaman mengenai perbedaan budaya dapat menjadi ruang bagi arkeologi berperan memberi informasi/data. Para arkeolog tentu perlu mengarahkan penelitian di Papua untuk menjelaskan bagaimana hadirnya keragaman budaya Papua, baik secara lokal, regional, maupun nasional dan



Foto 8. Lukisan cadas Situs Funmalelen, Misool (atas); wadah kubur di Situs Gua Padwa, Yendidori, Kab. Biak (tengah); gelang kerang, bekal kubur dari Situs Manwin Arfai, Biak (bawah)

mondial (dunia). Hasil penelitian semacam ini sebaiknya lebih aktif lagi dipublikasikan, didokumentasikan dan disebarluaskan kepada anggota legislatif, para eksekutif, dan penggiat LSM, bukan terbatas pada kalangan peneliti, akademisi, dan pemerintah daerah saja. Karena itu oplah dan materi Jurnal Papua, Berita Penelitian Arkeologi, *leaflet*, serta *web-site* terus perlu ditingkatkan dan disebarluaskan, sehingga dapat melengkapi pemahaman ideologis dan akademis tentang pola multikulturalisme di Papua dalam berbagai kelompok diskusi.

Sebagaimana ditengarai (Kymlicka 2002: 13-14), ada dua kasus yang menimbulkan pola besar multikulturalisme pada umumnya, yaitu:

(a) masuknya ke dalam negara yang lebih besar, budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya (suku-suku besar), yang terkonsentrasi secara teritorial, baik di pesisir maupun pegunungan; (b) imigran perorangan atau keluarga. Kedua pola besar tersebut terjadi pula di Papua sampai sekarang, yang mana telah banyak dinarasikan jejaknya lewat laporan penelitian arkeologi, sejarah dan antropologi. Untuk menghasilkan narasi jejak multikulturalisme tersebut, para peneliti Balai Arkeologi Jayapura telah memulai dengan tema Austronesia sebagai satu *trend* kebudayaan yang tampak dapat menjadi “*cultural bridging*”²⁶ Bangsa Indonesia. Sungguh, tema Austronesia Prasejarah hingga masa Islam/Kolonial yang dibicarakan pada EHPA tahun 2010 di Yogyakarta memiliki relevansi dalam upaya penelitian di Papua dan secara bertahap telah dilakukan, seperti penelitian Balai Arkeologi Jayapura di Biak dan Kawasan Danau Sentani. Data dari kedua wilayah penelitian tersebut telah menunjukkan adanya jejak akulturasi, bahkan asimilasi budaya Melanesia dan Austronesia (Djami 2011; Suroto 2011).

Prospek pemanfaatan data arkeologi semacam itu dalam bidang ideologis, terkait dengan penguatan jati diri, karena identitas budaya akan memberikan suatu pegangan untuk identifikasi diri (seseorang) dan keamanan dari kepemilikan aman tanpa upaya (Kymlicka 2002: 134). Menurut Margalit dan Raz (1990) serta Charles Taylor (1992), apabila suatu kebudayaan tidak dihormati, maka martabat dan rasa harga diri para anggotanya akan juga terancam (Kymlicka, 2002: 134). Penemuan dan penulisan sumberdaya arkeologi secara baik (informatif) tentu akan meningkatkan rasa harga diri Orang Papua yang setara dengan suku bangsa lain di Indonesia, sehingga dapat berguna dalam mengatasi konflik ideologi kebangsaan. Agar konflik ideologis tidak berulang-kali terjadi, arkeologi dapat berperan dalam usaha mempertahankan kepentingan sektorsial atau

²⁶ *Cultural bridging* bermakna fenomena proses budaya yang menghubungkan bagian-bagian yang berbeda sehingga terbangun tanggapan budaya dan jiwa/kepribadian yang sama, pada akhirnya mewujudkan kepribadian bangsa (lebih lanjut lihat Soedjatmoko 1995: 30-32).

kewilayahan ke dalam kehendak kolektif yang disebut oleh Antonio Gramsci “*historical bloc*”²⁷. Jika sejarawan mampu menjadikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) sebagai *historical bloc* atau monumen terpenting yang mengintegrasikan Bangsa Indonesia, maka arkeologi juga mungkin dapat memanfaatkan era diaspora Austronesia sebagai *cultural bridging* yang membawa ilham nilai-nilai dan meletakkan jejak kaitan sejarah bagi Papua, jauh sebelum era Sriwijaya, Majapahit, dan Bangsa Belanda. “Nilai-nilai bersama dan sejarah yang memberi ilham tak diragukan lagi membantu mempertahankan solidaritas dalam negara multibangsa” (Kymlicka 2002: 287). Lanjut Kymlicka, “apabila ada cara yang langgeng untuk memajukan rasa solidaritas dan tujuan bersama dalam Negara multibangsa, akan mencakup pengakomodasian, dari pada subordinasi identitas nasional. Katanya, orang dari kelompok bangsa berbeda hanya akan berbagi kesetiaan pada pemerintah Negara yang lebih besar apabila mereka melihatnya sebagai konteks dimana identitas bangsa mereka dibina dan bukannya dijadikan lebih rendah” (Kymlicka 2002: 287).

Pandangan Kymlicka tersebut mengisyaratkan pentingnya pengakomodasian budaya setempat dengan mengangkat keunggulan lokal (*local genius*)²⁸ salah satunya

27 *Historical bloc* dapat dipahami sebagai monumen sejarah yang dapat merekat berbagai asal-usul dan kepentingan dalam perjalanan suatu masyarakat dan bangsa. Menurut Antonio Gramsci, “*historical bloc*” merupakan usaha untuk mempertautkan kepentingan-kepentingan sektional ke dalam suatu kehendak kolektif (Latif 2009: 145)

28 Istilah *local genius* ditemukan dan diungkapkan tokoh arkeolog bernama Quaritch Wales dalam bukunya *The Making of Greater India: A Study in South-east Asia Culture Change*. Wales berpendapat bahwa *local genius* yang dimaksudkan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami sebagai substrat kebudayaan pra-India atau yang biasa disebut sebagai pribumi. Menurut Haryati Subadio (1986:18), *local genius* dapat dipahami secara keseluruhan dan mungkin dapat dianggap sama dengan, apa yang dikenal dengan *cultural identity* (identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa). Oleh karena itu, *local genius* memiliki daya mengendalikan serta memberi arah bagi perkembangan kebudayaan (Lebih lengkap, dapat dibaca pada buku Ayatrohaédi (1986) berjudul *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*).

lewat penelitian arkeologi — yang sekaligus mendorong adanya upaya pembinaan identitas Papua yang setara dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Hasil penelitian arkeologi misalnya, dapat mengungkapkan narasi bahwa penduduk yang mendiami Papua bukan subordinasi, melainkan juga telah memainkan peran penting secara bersama-sama di Nusantara dalam jaringan perdagangan, migrasi, dan lain-lain. Bahkan diketahui bahwa wilayah Papua merupakan salah satu tempat awal tumbuhnya pertanian non biji-bijian di dunia, jauh sebelum kedatangan budaya ras penutur bahasa Austronesia.



Foto 9. Sistem pertanian pada masyarakat Suku Ekari, Kampung Obano, Kabupaten Paniai, Propinsi Papua

Berbagai informasi lainnya juga perlu diberikan kepada para birokrat lewat penyuluhan untuk memberikan wawasan mengenai arah program arkeologi dan hasil-hasilnya di Papua. Para birokrat di daerah juga perlu dibekali informasi aspek-aspek kebijakan pemerintah yang mendasari perlunya pengelolaan dan proteksi sumberdaya arkeologi bagi kepentingan ideologis, akademis, dan praktis (ekonomis). Balai Arkeologi Jayapura pada tahun 2008 bekerjasama dengan Pemerintah propinsi Papua telah melakukan bentuk-bentuk penyuluhan semacam itu di Kabupaten Waropen, Serui, dan Kabupaten Jayapura. Diharapkan para birokrat lewat audiensi dan pemaparan arah kegiatan-kegiatan penelitian arkeologi di wilayahnya mereka dapat memperoleh informasi yang berguna dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sumberdaya arkeologi di wilayahnya masing-masing.

Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi untuk masyarakat lokal dilakukan dengan melibatkan mereka berpartisipasi dalam



Foto 10. Penyuluhan arkeologi untuk para anggota legislatif, eksekutif, dan LSM di Serui, Papua



Foto 11. Seminar hasil penelitian arkeologi yang membahas tema “Perspektif Austronesia dalam dinamika kebangsaan dan pembangunan”

kegiatan yang berdimensi akademis, dimulai pada tahapan diskusi hasil penelitian, kemudian seminar, dan terakhir tahapan *Workshop* Lintas-*Stakeholders*. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk memberi inspirasi mereka agar ikut memikirkan, berperan, dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumberdaya arkeologi sebagaimana UU RI No. 11/2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk mematangkan hasil-hasil seminar dan diskusi publik dalam rangka menuju tingkat rencana aksi (kegiatan) untuk semua, Balai Arkeologi Jayapura melakukan *Workshop*-Lintas *Stakeholder* yang dihadiri wakil-wakil pemangku kepentingan dari 3 kabupaten/kota di sekitar Jayapura, yaitu representasi dari Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, pemerintah Propinsi Papua. Selain pemerintah daerah *Workshop* Lintas-*Stakeholder* juga dihadiri sejumlah kepala suku (Ondoafi), Universitas Cenderawasih (Jurusan Sejarah dan Antropologi), BPSNT,

Museum Propinsi Papua, Balai Bahasa, Taman Budaya, dan wakil dari media massa. Mengacu pemaparan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di awal pertemuan, *workshop* tersebut telah menghasilkan sejumlah butir rekomendasi yang intinya berkenaan dengan perlunya upaya pemanfaatan sumberdaya arkeologi bagi semua lapisan masyarakat dengan mengacu pada tata aturan Undang-Undang serta akan diupayakannya pertemuan berkala diantara para *stakeholder* untuk melakukan penajaman program bersama. Rekomendasi pertemuan *workshop* Lintas *Stakeholder* Arkeologi telah disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Bappeda-nya, Lembaga Adat, dan semua lembaga yang berpartisipasi dalam *workshop*.

Memang ke depan arkeologi tampaknya memiliki tanggung jawab memberi masukan dan pertimbangan sekaligus acuan bagi aktivitas pembangunan bagi para anggota legislatif, eksekutif dan LSM. Diketahui bahwa sumberdaya arkeologi (situs dan artefaknya) merupakan “titipan” yang sangat terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Justru itu, peletakan konsep pembangunan fisik, sosial, budaya sekarang, selayaknya mempertimbangkan bagian “titipan” sumberdaya arkeologi dalam perencanaannya.



Foto 12. *Workshop* Lintas *stakeholder* Arkeologi di Jayapura, Propinsi Papua

3.4 Arkeologi untuk Penegak Hukum

Para penegak hukum di Indonesia, sering kecolongan akibat lemahnya informasi dan pengetahuan akan sumberdaya arkeologi

serta hukum positif yang memproteksi. Banyak pelanggaran undang-undang yang bebas tanpa tindakan, begitu pula banyak sumberdaya arkeologi yang lepas dengan mudah dari tangan kita ke luar negeri. Papua menjadi sorga bagi kolektor “nakal”, karena sebagian besar asset budaya belum dikenal secara baik oleh umum, bahkan sebagian besar belum teregistrasi. Memang belum ada jumlah pasti mengenai pencurian, pengrusakan, dan pelanggaran hukum lain terhadap sumberdaya arkeologi di Papua, tetapi bisa diduga cukup besar. Dugaan kondisi tersebut disebabkan masih lemahnya informasi bagi penegak hukum sumberdaya arkeologi yang seharusnya mereka ikut lindungi di wilayahnya.

Para penegak hukum di Papua tampaknya masih memerlukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai sumberdaya arkeologi, serta aspek-aspek hukum/kebijakan pemerintah yang mendasari perlunya proteksi sumberdaya arkeologi bagi kepentingan ideologis, akademis, dan praktis (ekonomis). Tidak sedikit aturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat dan pemerintah untuk meneliti, melindungi, mengembangkan dan mengelola sumberdaya arkeologi (cagar budaya), baik secara nasional maupun lokal. Secara nasional, UU RI No. 11/2010 belum tersosialisasi secara sistematis sampai ke level bawah penegak hukum, sehingga jika ada laporan juga penindakannya sangat lambat. Sementara tingkat lokal kewajiban mengelola dan melindungi sumberdaya arkeologi termaktub dalam UU No: 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 64 ayat 1, bahwa pemerintah wajib mengelola lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan. Selanjutnya disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas kepolisian, jaksa, dan hakim, informasi yang akurat dan *up to date* terus diperlukan. Terutama kepolisian, mereka perlu informasi terbaru akan temuan yang patut diproteksi sebagai bagian tugasnya. Karena itu, data kawasan sumberdaya arkeologi dan temuan-temuan terbaru hasil penelitian juga sebaiknya disampaikan kepada pihak penegak hukum di wilayah yang dibawahinya, terutama data lokasi dan asset yang terdapat di dalamnya. Data tersebut sebaiknya disertai rekomendasi dari arkeolog hal-hal yang perlu dilakukan demi kelancaran pihak penegak hukum menjalankan tugasnya.

3.5 Arkeologi untuk Manajer Arkeologi dan Arkeolog

Bagi manajer dan arkeolog, tugas mereka sangat luas dan kompleks, dapat dikatakan mereka bagian dari sumberdaya arkeologi itu sendiri, dari kegiatan hulu hingga hilir. Para manajer bekerja pada lembaga arkeologi atau perusahaan yang mengelola sumberdaya arkeologi akan menjadi motor penggerak manajemen. Para manajer akan mengatur siklus penelitian, pengembangan, pengelolaan, dan proteksi sumberdaya arkeologi. Sementara itu, arkeolog bekerja sebagai konsultan, peneliti dan juga bisa menjadi manajer sekaligus dalam aktivitas manajemen sumber daya arkeologi.

Para manajer diharapkan perannya dalam manajemen sumberdaya arkeologi, mengatasi hambatan kultural, kemitraan/kerjasama antarlembaga, finansial, promosi, sampai pemasaran dan juga proteksi. Disadari bahwa pekerjaan mengelola kawasan sumberdaya arkeologi sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Data yang akurat sangat diperlukan oleh para manajer merencanakan pengelolaan dan mengatur siklus kerja berbagai sektor yang ikut berpartisipasi dalam upaya pengembangan kawasan sumberdaya arkeologi. Para manajer akan menentukan model pengelolaan sumberdaya arkeologi, mengatur kapan arkeolog masuk bekerja, kapan pihak PU, kapan pemerintah daerah, dan seterusnya.

Dengan sistem manajemen yang semakin baik, para arkeolog (peneliti) akan memperoleh peluang untuk lakukan penelitian dan menyampaikan temuan baru beserta rekomendasi. Selanjutnya, arkeolog dapat berupaya melakukan proteksi, baik preservasi maupun konservasi. Dalam penelitian di kawasan Danau Sentani misalnya, ditemukan struktur jalan perkampungan dan penguburan protosejarah. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian kemudian dilaporkan dan direkomendasikan arkeolog untuk ditindaklanjuti kepada para manajer, baik di lingkungan lembaga arkeologi (Balai Arkeologi dan BP3) maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Papua dan Kabupaten Jayapura untuk melakukan proteksi.

Secara akademik, penelitian arkeologi akan menghasilkan tambahan data bagi ilmu pengetahuan tentang sejarah peradaban manusia masa lalu, bahkan dapat menginspirasi munculnya isu baru. Rekonstruksi tentang asal-usul manusia, kebudayaan dan perubahan lingkungannya dapat menambah data maupun pengetahuan tentang sejarah kebudayaan serta cara-cara kehidupan dan proses budaya masa lalu. Data hasil penelitian akan sangat berguna bagi arkeolog konsultan dalam merencanakan upaya preservasi dan konservasi. Sementara bagi arkeolog (peneliti) dengan data penelitian mereka akan menjelaskan diaspora penutur Bahasa Austronesia dan kontak budaya dengan budaya Melanesia di pesisir Papua. Rekonstruksi arkeolog (peneliti) mengenai temuan ini akan memberi manfaat ideologis dalam upaya pengembangan jati-diri/karakter bangsa dan memperkuat integrasi (nasionalisme) dengan “*cultural bridging*” Austronesia.

Manfaat dari temuan arkeologi akan lebih banyak jika usaha pemasarakatan dilakukan oleh para arkeolog bersifat reproduksi ganda. Di Balai Arkeologi Jayapura, hasil penelitian arkeologi telah dipublikasikan lewat jurnal sejak tahun 2009, Berita Penelitian Arkeologi (BPA) sejak tahun 2006, dan leaflet sejak tahun 2010. Selain itu, untuk kepentingan masyarakat diproduksi pula film dokumenter tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian disosialisasikan pula lewat penyuluhan serta kerjasama penerbitan



Foto 13. Upaya rekonstruksi kebudayaan dengan metode ekskavasi di Situs Yemokho, Sentani, Papua (atas); *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pelajar SMA di Waigeo, Kab. Raja Ampat (tengah); Temuan situs megalitik di Kampung Baru, Yoka, tepi Timur Danau Sentani (bawah)

buku. Terbitan-terbitan informasi hasil penelitian arkeologi telah didistribusikan ke pemerintah kabupaten/kota Papua, lembaga penelitian, sekolah, universitas, dan beberapa pihak lainnya. Harapannya, reproduksi informasi arkeologi dapat menjadi bacaan yang mencerahkan wawasan akan aspek sejarah-kebudayaan bangsa, khususnya wilayah Papua. Di kemudian hari, publikasi hasil-hasil penelitian arkeologi diharapkan dapat menjadi inspirasi pembangunan untuk semua mulai

dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam tiga kepentingan utama: ideologis, akademisi (muatan lokal pendidikan), dan praktis (pariwisata).

3.6 Arkeologi untuk Pariwisata

Secara praktis, manfaat publikasi hasil penelitian, terbukti dari keberhasilan Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia. Sejak tahun 1908, Bali telah dipromosikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sebuah daerah tujuan wisata. Bali semakin dikenal berkat banyaknya orang Barat “menulis” tentang Bali dalam buku-buku maupun kisah-kisah perjalanan para pelancong (Vickers 1989; Picard 1990 dalam Maunati 2004: 243). Jika Balai Arkeologi dan Pusat Arkeologi Nasional juga dari sekarang gencar menulis buku dan kisah perjalanan yang terpublikasi secara luas, bukan mustahil dapat meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan ke situs-situs arkeologi di masa depan. Dengan keragaman potensi situsnya, Papua juga bisa optimis sebagaimana sudah tampak berkembang di Pulau Jawa, seperti Borobudur, Prambanan, Sangiran, Trowulan, dan Banten Lama. Tampaknya, jika hasil penelitian arkeologi hendak didayagunakan untuk promosi wisata, tentu diperlukan keseimbangan perkembangan antara penelitian dan publikasinya, yang berarti 1 berbanding 1. Semakin ideal lagi jika 1 penelitian dapat direproduksi menjadi bahan publikasi lebih banyak yang menghasilkan bentuk dan sumber informasi beragam yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Lewat pintu pariwisata, informasi aset situs dan sumberdaya arkeologi lainnya dapat dibentuk agar menjadi “keajaiban” pembangunan. Belajar dari apa yang ditempuh Malaysia, mungkin kita arkeolog juga perlu menetapkan fokus penguatan informasi dan konservasi sumberdaya arkeologi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai fokus koridor MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Upaya penguatan informasi sumberdaya arkeologi yang sejalan dengan MP3EI ditujukan untuk membantu meningkatkan pencitraan wilayah sebagai daerah yang sudah maju. Dengan

citra tersebut diharapkan tenaga terampil dan profesional dari luar mau datang bekerja di daerah tersebut sesuai bidangnya. Peran arkeologi dalam peningkatan pencitraan pada daerah koridor MP3EI mungkin dapat dimulai dari proses pembentukan citra sumberdaya arkeologis dengan berupaya mengubah pola pikir orang dalam memandang situs dan lingkungannya. Proses transformasi pola pikir dilakukan melalui cara-cara yang baru untuk menciptakan sebuah objek, atau banyak objek, yang bisa dikonsumsi: dibeli, difoto, terutama diceriterakan dan dipahami.

Pengembangan hasil penelitian akan sangat memiliki prospek memberi manfaat bagi semua masyarakat jika terus didorong ke arah sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, menciptakan destinasi baru dengan terus berupaya menyajikan hasil-hasil penemuan baru. Destinasi baru secara langsung menunjukkan bahwa studi yang terinci tentang sumberdaya arkeologi mampu menciptakan daya-tarik untuk menjadi obyek wisata melalui konstruksi dan rekonstruksi lokalitas. Pola proses penelitian demikian tampak ‘sudah mulai ditulis’ para arkeolog Indonesia pada umumnya, sementara peneliti Balai Arkeologi Jayapura baru mulai akan menata orientasi riset seperti Balar lainnya. Untuk memberi nilai tambah manfaat informasi penelitian dasar yang telah dimiliki, penelitian arkeologi terapan yang telah mulai dilakukan dalam satu tahun terakhir (sejak tahun 2011) terus ditingkatkan. Sebelumnya, Balai Arkeologi kebanyakan berfokus pada aspek ideologis dan akademis; asal-usul/migrasi, religi, sistem pemukiman, dan lain-lain. Hasil-hasil penelitian arkeologi tersebut dapat bermanfaat untuk memperkuat pengembangan informasi dan pemahaman mengenai objek wisata sejarah, khususnya di klaster unggulan Raja Ampat, Biak, Kaimana, dan Sentani.

Kedua, membantu meningkatkan citra bangsa yang berdampak pada daya tarik tenaga kerja trampil dan profesional. Dengan banyaknya sumberdaya arkeologi yang dimanfaatkan dalam kaitan pembangunan praktis (khususnya pariwisata) akan mengangkat pencitraan Bangsa Indonesia di

mata dunia, termasuk Papua. Dalam konteks upaya seperti itu, Kahn (1997); Maunati 2004: 240) memaparkan pelajaran baik dari negeri Jiran, bahwa usaha-usaha pemerintah negara tersebut mengkonservasi situs-situs peninggalan bersejarah yang penting berkaitan langsung dengan maksud pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Malaysia adalah sebuah negara



Foto 14. Wisatawan Amerika di Situs Perang Dunia II, Gua Binsari, Biak (atas); wisatawan Jepang di Situs Perang Dunia II, Gua Binsari, Biak (bawah)

yang sudah maju dan menarik. Pemerintah Malaysia berharap citra yang dibangun dengan pengembangan informasi dan penanganan situs arkeologi menjadi penting untuk menarik tenaga kerja yang trampil dan profesional dari berbagai bidang (Kahn 1997).

3.7 Semarak Arkeologi: *Event* Arkeologi untuk Semua

Upaya ke arah memadukan tiga dimensi arkeologi (ideologi, akademis dan praktis) dalam satu momentum dengan partisipasi

semua lapisan masyarakat semangatnya dapat tercermin dari kegiatan “Semarak Arkeologi”. Kegiatan Semarak Arkeologi dilakukan secara bersama-sama oleh Puslitbang Arkenas dan 10 Balai Arkeologi se-Indonesia. Semarak Arkeologi melibatkan semua kelompok kepentingan sebagaimana rumusan Carman: masyarakat umum; pelajar dan guru; anggota legislatif dan para eksekutif (termasuk birokrat), penegak hukum, manajer dan arkeolog; serta masyarakat lokal. Untuk kepentingan masyarakat umum, disajikan pameran hasil penelitian arkeologi. Sementara khusus untuk pelajar dan guru digelar pemutaran film dokumenter hasil penelitian arkeologi dan lomba-lomba yang memiliki horizon pengenalan dan apresiasi sumberdaya arkeologi yang melibatkan siswa Taman Kanak-kanak sampai SMU.

Bagi masyarakat umum, disajikan pameran hasil penelitian arkeologi dari 10 Balai Arkeologi di Indonesia. Untuk melengkapi gambaran proses penemuan situs dan artefak serta makna yang terkandung di dalamnya, para pelajar dan guru diberi kesempatan menyaksikan film dokumenter arkeologi. Sinergis dengan dua kegiatan sebelumnya, pelajar SMU juga diberi kesempatan menjadi pemandu pameran sebagai bagian dari lomba-lomba yang dilaksanakan. Sementara untuk anggota legislatif dan para eksekutif (termasuk birokrat), penegak hukum, manajer dan arkeolog, di bagian lain dilaksanakan seminar yang membahas isu ideologis, akademis, dan praktis (pemanfaatan) sumberdaya arkeologi.

Pihak swasta dan pedagang kaki lima, juga ikut berpartisipasi aktif dalam event ini. Pihak swasta memanfaatkan event ini untuk mempromosikan produknya, karena dipandang bertaraf nasional dan dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, baik dari tingkat usia, pendidikan, gender, maupun profesi. Hal ini merefleksikan bahwa informasi hasil penelitian dapat juga memberi dampak ganda (*multiflayer effect*) jika kita secara bersama membangunnnya dari semangat “arkeologi untuk semua”.

Khususnya masyarakat lokal, mereka dilibatkan dalam pertunjukan Semarak



Foto 15. Lomba mewarnai benda budaya tingkat TK (kiri atas); Lomba menggambar benda budaya dan dunia purba tingkat SD (tengah atas); Salah satu finalis lomba menggambar periuk gerabah (kanan atas); Lomba rekonstruksi gerabah tingkat SMP (kiri bawah); Lomba memandu pameran arkeologi tingkat SMA (tengah bawah); Penayangan film pendidikan arkeologi dan lomba resensi film Tk. SMA (kanan bawah), (Dok: Semarak Arkeologi I 2009 dan Semarak Arkeologi II 2010)



Foto 16. Seminar nasional dalam rangka Semarak Arkeologi, diikuti akademisi, birokrat, anggota legislatif, aparat penegak hukum, LSM, tokoh adat, dan para guru (kiri); Penyambutan tamu dan undangan dengan tarian adat Papua pada prosesi pembukaan Semarak Arkeologi (tengah); Asisten II Pemprop Papua mewakili Gubernur meninjau pameran dan lomba-lomba Semarak Arkeologi I di Jayapura (kanan)



Foto 17. Semarak Arkeologi : Guru, siswa dan orang tua mengunjungi pameran hasil penelitian arkeologi (kiri atas); Pengunjung berpose mengabadikan momen (tengah atas) *Experimental archaeology*: Pembuatan kapak batu dari masyarakat adat Sentani (kanan atas); Pembuatan lukisan kulit kayu oleh masyarakat adat Sentani (kiri bawah); Pembuatan garpu kayu alat pembuat papeda oleh masyarakat adat Sentani (tengah bawah); Pembuatan gerabah dari masyarakat Kampung Abar, Sentani (kanan bawah)

Arkeologi. Masyarakat lokal terlibat dalam seni pertunjukan pembukaan dan penutupan Semarak Arkeologi. Mereka juga diberi ruang untuk pemasaran produk yang juga sebagai bentuk uji-coba komodifikasi *event* arkeologi. Komodifikasi bentuk artefak sebagaimana temuan penelitian arkeologi pada Semarak Arkeologi I di Jayapura, menghadirkan masyarakat pengampu tradisi prasejarah berlanjut dari kawasan Danau Sentani. Masyarakat lokal melakukan *experimental archaeology* pembuatan alat tulang, gerabah, kapak batu, dan lukisan kulit kayu. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dipertunjukkan dan barang-barang yang mereka bawa untuk dipamerkan dijual selama kegiatan berlangsung. Dari mereka diperoleh informasi bahwa hasil penjualan mereka cukup baik, dibandingkan di luar moment Semarak Arkeologi.

4. Penutup

Sejauh ini, masalah aktual yang dihadapi arkeologi adalah bagaimana hasil-hasilnya dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Secara ideologis untuk menjadikan arkeologi berguna bagi semua, hasil-hasilnya harus dapat mentransfer informasi pengetahuan dan menunjukkan bukti material (artefak) dari “nilai-nilai yang dimiliki bersama”. Untuk itu, arkeolog tampaknya perlu berupaya menghasilkan gambaran konstruksi Indonesia mengenai akar yang sama berkenaan nilai penting religiusitas, etika, kosmologi, dan kehumanisan, seni, kebersamaan, nasionalisme, dan multikulturalisme. Lalu, narasi tersebut ditunjang dengan konservasi (pelestarian) fisik situs, artefak, dan lingkungannya, sehingga bermanfaat sebagai alat peraga guna mengefektifkan proses pendidikan pelajar (Macleod 1977).

Secara akademis, Papua masih merupakan ladang data yang cukup orisinal bagi para ilmuwan, peneliti dan peminat kebudayaan. Masih sangat banyak data sejarah-kebudayaan dari masa lalu yang berguna bagi semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digali di wilayah Papua. Hasil-hasil penelitian dapat menjadi bahan ajar yang menarik bagi para guru sebagai muatan

lokal pendidikan dalam upaya penguatan karakter dan nasionalisme Bangsa Indonesia. Disadari bahwa arkeologi dapat berperan dan bermanfaat dalam pembangunan mental-spiritual dengan membangkitkan kesadaran dan kebanggaan akan sejarah peradaban serta kebudayaan lokal, regional dan nasional, sehingga mampu memperkokoh karakter serta jatidiri bangsa.

Peran arkeologi di dunia pendidikan akan sangat berbeda dengan di lingkungan pariwisata. Dunia pendidikan akan sangat membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas “mata-air” informasi/pengetahuan arkeologi yang dihasilkan aktivitas penelitian di hulu agar dapat berperan sebagai katalisator pendidikan karakter bangsa. Sementara arkeologi dalam dunia praktis (pariwisata) selayaknya diminta berperan merekonstruksi, merawat, melestarikan, dan merevitalisasi sumberdaya arkeologi agar menjadi produk yang laku dijual dengan “merek” tertentu (*branding*). Disini tampak perbedaan sisi tugas pada kedua bidang: pada dunia pendidikan arkeologi akan mengemban peran meningkatkan wawasan dan internalisasi nilai budaya, sementara di bidang pariwisata menambah “daya tarik” obyek. Singkatnya, arkeologi untuk pendidikan menekankan “pesan” (ilmu pengetahuan), pariwisata “kesan” (citra obyek).

Secara praktis, hasil penelitian arkeologi juga ikut mendorong ekonomi rakyat. Pada fase awal, tentu hasil penelitian yang dirancang secara terpadu dapat berperan menjadi “katalisator” pengembangan destinasi. Caranya, arkeologi menunjukkan informasi baru (keunikan atau keajaiban) sehingga memperkuat citra obyek destinasi. Bagaimanapun ekonomi kreatif sulit bergerak tanpa dukungan informasi obyek utama yang dapat menjadi ikon daya tarik wisata, baik sumberdaya arkeologi maupun keindahan alam. Dengan manfaat praktis, lembaga arkeologi dapat menjadi “fasilitator” (jembatan) tiga kepentingan sekaligus: ideologis, akademis, dan ekonomis. Dalam peran sebagai “fasilitator” lembaga arkeologi diharapkan juga mampu menggerakkan masyarakat dengan memberi dukungan pada

program partisipatif²⁹, baik lewat universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat lainnya.

Bagi kita lembaga arkeologi, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan apresiasi semua *stakeholder* terletak pada sejauh mana kita juga dapat terus-menerus mampu mempersembahkan hal-hal baru. Tampaknya, arkeologi butuh rekayasa program terus-menerus jika ingin berorientasi pada manfaat untuk semua. Artinya, sumberdaya arkeologi

merupakan komponen penting masa kini (Cleere 1989: 5-6), sehingga hasil penelitian arkeologi dari sumber-sumber masa lalu harus dapat diorientasikan melayani kebutuhan masa kini untuk semua. Karena itu, bisa dikatakan bahwa arkeologi untuk semua memiliki prospek, tergantung sejauhmana kontinuitas program yang menyentuh *stakeholders* dapat kita laksanakan dan wujudkan secara berkelanjutan.

²⁹ Program penelitian partisipatif sudah menjadi kecenderungan yang digunakan ilmu sosial. *Sosiologi* dan antropologi telah lama menggunakan pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), terutama mereka yang bergerak di lapangan LSM. Kedua istilah ini digunakan untuk menekankan pentingnya akses, peran, dan kontrol masyarakat dalam segala segi pembangunan yang sangat lama diabaikan model-model program pembangunan negara sebelumnya. Beberapa panduan referensi terkait, diantaranya: buku berjudul *Akses Peranserta Masyarakat* (Rudito, *et al.* 2003); *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan* (Mikkelsen 1999), dan *Pembaharuan Desa secara Partisipatif* (Santoso 2003).

Daftar Pustaka

- Anonim. 2011. “Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya”. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Bakker SJ, J.W.M. 1990. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kanisius. Cet. ke-4.
- Binford, L.R. 1972. *An Archaeological Perspective*. New York and London: Academic Press.
- Carman, John. 2001. *Archaeology and Heritage: An Introduction*. New York: Continuum.
- Cleere, H.F. (ed.) 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin Hyman.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Cet. VI.
- Djami, Erlin Novita. 2011. “Penelitian Arkeologi di Kabupaten Biak Numfor (Manusia Berpenutur Austronesia)”, Laporan Penelitian. Jayapura: Balai Arkeologi Jayapura.
- Hardiman, F. Budi. 2002. “Belajar dari Politik Multikulturalisme”, Pengantar Buku Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: Pustaka LP3ES-Indonesia.
- Haviland, William. A. 1988. *Antropologi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga. Edisi ke-4.
- Howard, Peter. 2002. *Heritage: Management, Interpretation, Identity*. London: Continuum.
- Geertz, Clifford. 1996. *Welt in Stueken Kultur und Politik am Ende de 20 Joehrhunderts*. Passagen-Verleg, Wien.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karyatulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kahn, Joel S. 1997. “Culturalizing Malaysia: Globalism, Tourism, Heritage, and the City in Georgetown”, dalam Michel Picard & Robert E. Wood (eds.), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1995. *700 Tahun Majapahit (1293-1993), Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kern, H. 1917. “De Nagarakrtagama. Oudjavaansche Lofdicht op Koning Hayam Wuruk van Majapahit”. VG VII: 249-320; VG VIII: 1-132.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Krom, N.J. 1919. *Oud-Javaansche Lofdicht Nagarakrtagama van Prapañca (1365 AD)*. Meet Aantekeningen van N.J. Krom. s’Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: Pustaka LP3ES-Indonesia.
- Latif, Yudi. 2009. *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Macleod, Donald. G. 1977. “Peddle or Perish: Archaeological Marketing from Concept to Product Delivery”, dalam Schiffer M.B. dan G.J. Gumerman (ed.), *Consevation Archaeology*. London: Academic Press.

- Mahmud, M. Irfan. 2011. "Jejak Austronesia, Melanesia, dan Tradisi Prasejarah Berlanjut di Papua", dalam M. Irfan Mahmud dan Erlin Novita Idje Djami (ed.), *Austronesia dan Melanesia di Nusantara: Mengungkap Jati-Diri dari Temuan Arkeologis*: 43-74. Yogyakarta: Ombak.
- . 1998. "Pelestarian Benda Cagar Budaya ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologis", *Somba Opu*, Edisi ke 6, Tahun IV-April: 15-29 Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- . 2001. *Memediasi Masa Lalu: Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Makassar: Kerjasama Balai Arkeologi Makassar dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- . 2003. *Kota Kuno Palopo: Dimensi Fisik, Sosial, dan Kosmologi*. Makassar: Masagena Press
- . 2004. "Warisan Kultural dalam Perspektif Masyarakat: Studi Kasus Kawasan Situs Banten Lama". Tesis Universitas Indonesia. Depok.
- Mahmud, M. Irfan & Erlin Novita Idje Djami (ed.). 2011. *Austronesia dan Melanesia di Nusantara: Mengungkap Asal-Usul dan Jati-Diri dari Temuan Arkeologis*. Yogyakarta: Ombak
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- McGimsey III, Charles R. 1972. *Public Archaeology*. New York: Seminar Press.
- Melzer, Arthur M, Jerry Weinberger & M. Richard Zinman (ed.). 1998. *Multiculturalism and American Democracy*. Kansas: University Press of Kansas.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, Irawan Djoko. 2011. *Majapahit: Peradaban Maritim Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia*. Jakarta: Suluh Nuswantara Bakti.
- Peyon, A. Ibrahim. 2010. *Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat*. Jayapura: Nentien Focus. Edisi Pertama.
- Rudito, Bambang, Adi Prasetijo, Kusairi (ed.). 2003. "Akses, Peran-serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Purwo (ed.). 2003. "Pembaharuan Desa Secara Partisipatif". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedyawati, Edi. 2002. "Pembagian Peranan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya", dalam I Made Sutaba dkk., *Manfaat Sumberdaya Arkeologi untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*: 9-14. Denpasar: Upada Sastra.
- Sharer, Robert J. & Asmore, Wendy. 1979. *Fundamentals of Archaeology*. California: The Benjamin Cummings Publishing Company Inc.
- Simanjuntak, Truman. 2008 (ed.). *Austronesian in Sulawesi*. Yogyakarta: Galang Press-Center for Prehistoric and Austronesian Studies.
- Soedjatmoko. 1995. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. Cet. IV.
- Sukandar, Sri Chiirullia. 2011. "Identifikasi Aspek-Aspek Revitalisasi Kawasan Situs untuk Kepentingan Publik", Laporan Penelitian. Jayapura: Balai Arkeologi Jayapura.
- Sulistyanto, Bambang. 2003. *Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Suroto, Hari. 2011. "Ekskavasi dan Survei Arkeologi di Kawasan Danau Sentani", Laporan Penelitian. Jayapura: Balai Arkeologi Jayapura.

- Tanudirjo, Daud Aris. 2011. "Interaksi Austronesia – Melanesia, Kajian Interpretasi Teoritis", dalam M. Irfan Mahmud dan Erlin Novita Idje Djami (ed.), *Austronesia dan Melanesia di Nusantara: Mengungkap Jati-Diri dari Temuan Arkeologis*: 23-41. Yogyakarta: Ombak.
- Watson, Patty Jo & Carol Kramer. 1979. *Ethno-Archaeology*. New York: Columbia University Press.
- Wolters, O.W. 2011. *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII*. Jakarta: Komunitas Bambu.